

2022



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Kusumanegara 9 Yogyakarta
Telp. : (0274) 512063; Fax : (0274) 581335
Surel : program_indagkop@yahoo.co.id
Laman : disperindag.jogjaprov.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 15 Februari 2023

Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan DIY,



M. ARJAYANTI, M.P.A.

NIP. 196712041993032004

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri”:
 - Diukur dengan indikator nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY tahun N (atas dasar harga konstan).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 4 (empat) Program, yakni Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar Rp 9.873.321 Juta; sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi Rp 8.856.677 Juta. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 89,70%. Dengan demikian capaian tidak melampaui target, namun penilaian realisasi kinerja termasuk tinggi.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebesar Rp 8.379.070 Juta terjadi peningkatan sebesar Rp 477.607 Juta.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya industri pengolahan”:
 - Diukur dengan indikator nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY tahun N (atas dasar harga konstan).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Perencanaan dan Pembangunan Industri serta Program Pengendalian Izin Usaha Industri.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2022 Rp 14.215.611 Juta; sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 terealisasi Rp 13.392.567 Juta. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 94,21%. Dengan demikian capaian tidak melampaui target, namun penilaian realisasi kinerja termasuk sangat baik.

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebanyak Rp 12.670.357 Juta terjadi peningkatan sebanyak Rp 1.545.254 Juta.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY ke depan, sebagai berikut:

- a. Bahan baku industri tertentu masih tergantung pasokan dari negara lain sehingga peningkatan harga bahan baku akibat peningkatan biaya logistik, peningkatan harga komoditas dunia, terganggunya pasokan gandum akibat perang Ukraina-Rusia mengakibatkan terganggunya produktivitas sector industri pengolahan. Selain itu, sektor industri kecil Menengah masih terkendala Kapasitas SDM, teknologi, standarisasi, inovasi produk dan kemampuan akses pasar yang masih harus ditingkatkan.
- b. Kurangnya permintaan produk industri DIY dari pasar domestik maupun global juga berdampak pada produktivitas pelaku usaha sector ini. Hal ini dikarenakan daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih pasca pandemic, selain itu resesi di negara tujuan ekspor utama DIY menyebabkan berkurangnya order dari negara-negara tersebut.
- c. Perdagangan bebas memperluas peluang ekspor produk DIY, namun belum diimbangi dengan tersedianya infrastuktur dan sarana prasarana pendukung ekspor yang memadai. Selain itu, Eropa dan Amerika yang merupakan negara tujuan ekspor utama DIY tengah mengalami resesi sehingga berdampak pada terkendalanya ekspor DIY ke negara-negara tersebut.
- d. Peningkatan barang beredar yang merupakan dampak perdagangan bebas dan berkembangnya perdagangan online belum diimbangi dengan pemenuhan standarisasi produk secara optimal. Selain itu, kesadaran pelaku perdagangan tentang tertib niaga dan kesadaran konsumen mengenai hak-haknya masih kurang.
- e. Tingkat inflasi barang pokok penting yang cukup tinggi di akhir tahun 2022

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Ikhtisar Eksekutif.....	3
Daftar Isi	5
Daftar Tabel	6
Daftar Gambar	7
BAB I Pendahuluan.....	8
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi	
Perangkat Daerah	8
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	10
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	12
1.4 Isu-Isu Strategis	14
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	14
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021	18
BAB 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	19
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	19
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	20
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022	20
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	26
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	30
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja	32
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022	32
3.2 Inovasi	37
3.3 Lintas Sektor.....	37
BAB 4 Penutup	43
L A M P I R A N	46

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	14
Tabel I.2 Sarana-Prasarana	15
Tabel I.3 Anggaran Tahun 2022	16
Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 2017-2022	20
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan	20
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022	23
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022	24
Tabel II.4.1 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2022	27
Tabel II.4.2 Perjanjian Kinerja Reviu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2022	29
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	32
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2022	32
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1	33
Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja 2022 Sasaran 1	33
Tabel III.5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1	35
Tabel III.6 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran 2	36
Tabel III.7 Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	39

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja	9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	11
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	12
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP	30
Gambar II.2. Aplikasi JogjaKI	31

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2021*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

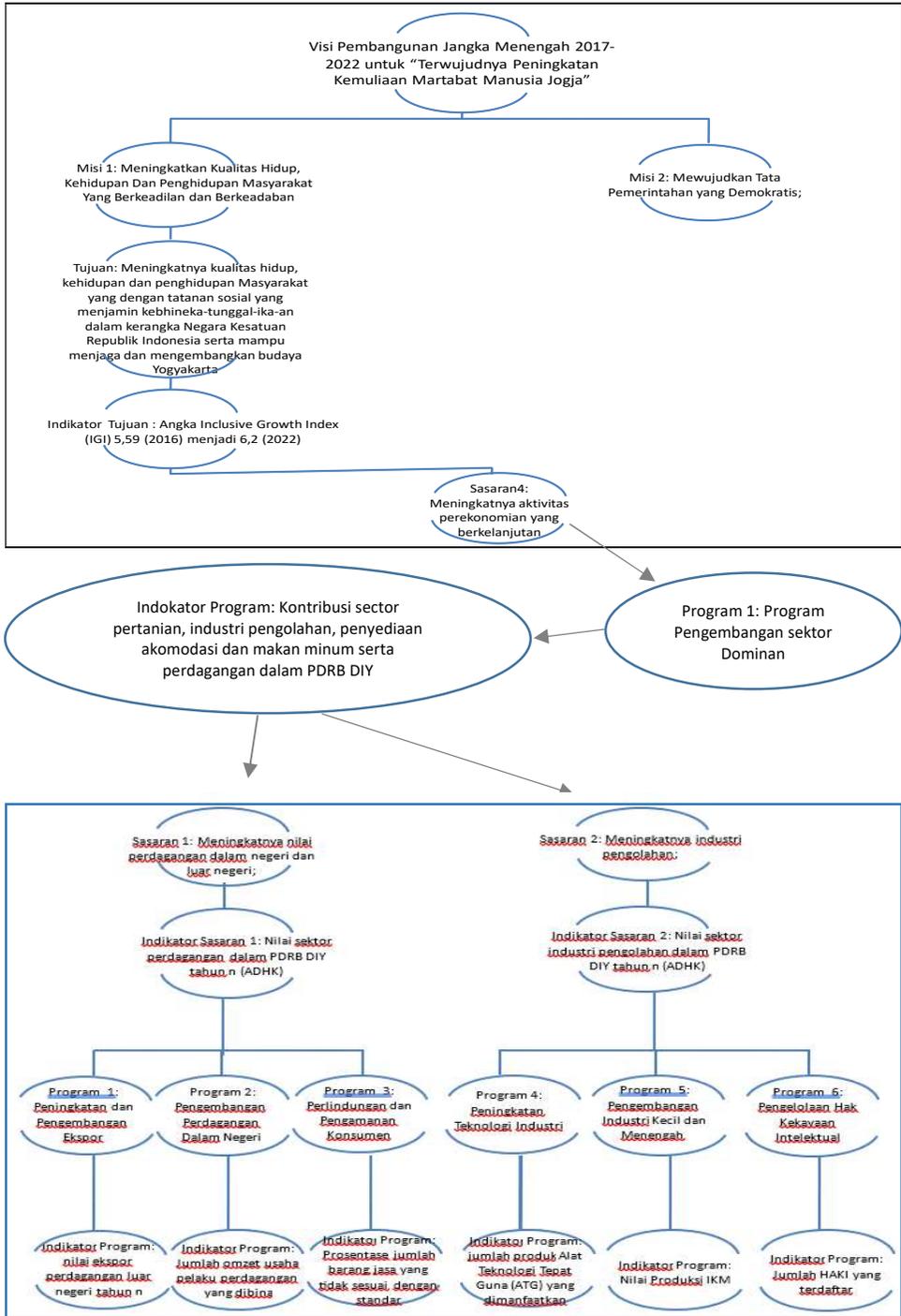
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja

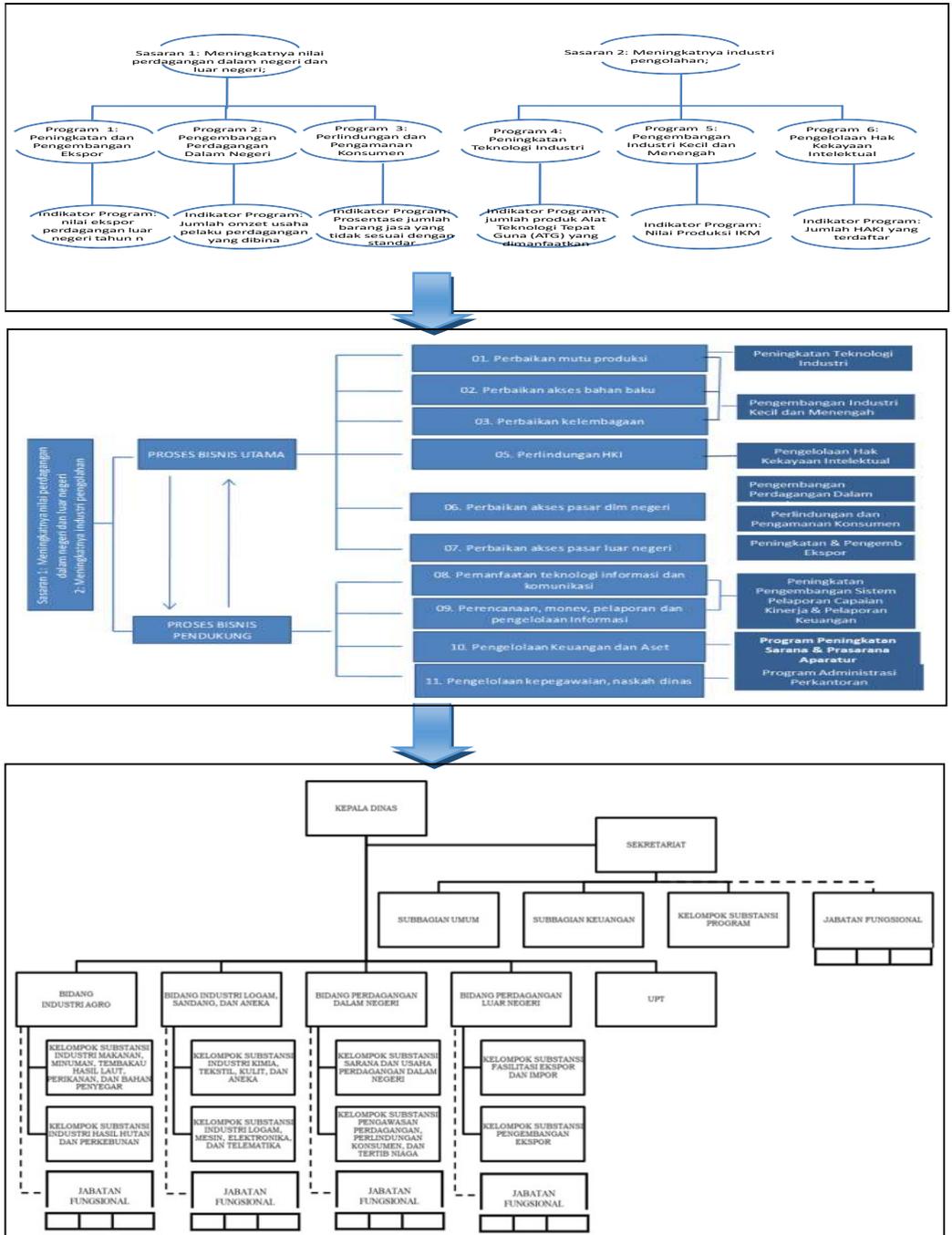


Sumber: Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 2017-2022

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY



Sumber: Perdais DIY No. 1 Th. 2018 dan Pergub DIY No. 86 Th. 2021

1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan. Adapun fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sebagai berikut

1. penyusunan program kerja Dinas;
2. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;
3. pengembangan sumber daya manusia industri dan perdagangan;
4. peningkatan pemanfaatan teknologi industri dan mutu standardisasi;
5. peningkatan kerja sama industri dan perdagangan;
6. fasilitasi infrastruktur industri di dalam dan di luar kawasan peruntukan industri;
7. fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan industri dan perdagangan;
8. pengelolaan dan pelaporan data industri dan perdagangan;
9. pembinaan dan pengawasan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
10. pembinaan dan pengembangan industri kreatif;
11. penyediaan layanan/fasilitasi konsultasi input dan sistem informasi industri nasional untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di lingkup Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangannya;
12. pengawasan distribusi bahan berbahaya;
13. penerbitan Surat Keterangan Asal dan Fasilitasi Angka Pengenal Impor;
14. pelayanan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi;
15. pengawasan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
16. fasilitasi pengembangan dan promosi produk ekspor;
17. pelayanan perlindungan dan pemberdayaan konsumen;
18. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
19. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan;
20. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota;
21. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
22. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
23. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Sesuai pelaksanaan tugas fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 86 tahun 2021 dapat dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana
<p>1. Kepala Dinas</p> <p>2. Sekretaris:</p> <p>1) Subkoordinator Kelompok Substansi Program</p> <p>2) Kasubbag Keuangan</p> <p>3) Kasubbag Umum</p> <p>3. Kabid Industri Agro:</p> <p>1) Subkoordinator Kelompok Substansi Industri Makanan, Minuman, Tembakau Hasil Laut, Perikanan, dan Bahan Penyegar</p> <p>2) Subkoordinator Kelompok Substansi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan</p> <p>4. Kabid Industri Logam, Sandang, dan Aneka:</p> <p>1) Subkoordinator Kelompok Substansi Industri Kimia, Tekstil, Kulit, dan Aneka</p> <p>2) Subkoordinator Kelompok Substansi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Telematika</p> <p>5. Kabid Perdagangan Dalam Negeri:</p> <p>1) Subkoordinator Kelompok Substansi Sarana dan Usaha Perdagangan Dalam Negeri</p> <p>2) Subkoordinator Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga</p> <p>6. Kabid Perdagangan Luar Negeri:</p> <p>1) Subkoordinator Kelompok Substansi Fasilitas Ekspor dan Impor</p> <p>2) Subkoordinator Kelompok Substansi Pengembangan Ekspor</p> <p>7. Kabalai Pengembangan Teknologi Tepat Guna</p> <p>1) Kasubag Tata Usaha</p> <p>2) Kasi Rekayasa dan Produksi</p> <p>3) Kasi Pengembangan dan Layanan Kemasan dan Produk Kulit</p> <p>8. Kabalai Pengelolaan Kekayaan Intelektual</p> <p>1) Kasubag Tata Usaha</p> <p>2) Kasi Pemberdayaan Kekayaan Intelektual</p> <p>3) Kasi Fasilitas Kekayaan Intelektual</p>	<p>1. Dibawah Subkoordinator Kelompok Substansi Program:</p> <p>1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan</p> <p>2) Analis Sistem Informasi</p> <p>2. Dibawah Kasubbag Keuangan:</p> <p>1) Bendahara; 2) Pengadministrasi Keuangan; 3) Pengelola Gaji; 4) Pengelola Akuntansi; 5) Verifikator Data Laporan Keuangan</p> <p>3. Dibawah Kasubbag Umum</p> <p>1) Pengadministrasi Umum; 2) Pengadministrasi Persuratan; 3) Pranata Kearsipan; 4) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur; 5) Teknisi Sarana dan Prasarana; 6) Kustodian Barang Milik Negara; 7) Pengemudi</p> <p>4. Dibawah Subkoordinator Kelompok Substansi Industri Makanan, Minuman, Tembakau Hasil Laut, Perikanan dan Bahan Penyegar:</p> <p>1) Pengadministrasi Umum</p> <p>2) Analis Pengembangan Usaha Agro Industri</p> <p>5. Dibawah Subkoordinator Kelompok Substansi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan:</p> <p>1) Analis Pengembangan Usaha Agro Industri</p> <p>6. Dibawah Subkoordinator Kelompok Substansi Industri Kimia, Tekstil, Kulit, dan Aneka:</p> <p>1) Pengadministrasi Umum</p> <p>2) Analis Industri</p> <p>7. Dibawah Subkoordinator Kelompok Substansi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Telematika:</p> <p>1) Analis Industri</p> <p>8. Dibawah Subkoordinator Kelompok Substansi Sarana dan Usaha Perdagangan Dalam Negeri:</p> <p>1) Pengadministrasi Umum</p> <p>2) Analis Perdagangan</p> <p>9. Dibawah Subkoordinator Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga:</p> <p>1) Pengawas Barang Beredar dan Jasa</p> <p>2) Pengelola Fasilitas dan Mediasi Perlindungan Konsumen</p> <p>10. Dibawah Subkoordinator Kelompok Substansi Fasilitas Ekspor dan Impor:</p> <p>1) Pengadministrasi Umum</p> <p>2) Analis Perdagangan</p> <p>11. Dibawah Subkoordinator Kelompok Substansi Pengembangan Ekspor:</p> <p>1) Penyusun Rencana Analisis Pasar Luar Negeri</p> <p>12. Dibawah Kasubag Tata Usaha</p> <p>1) Pengadministrasi Persuratan; 2) Pranata Kearsipan; 3) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan; 4) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur; 5) Kustodian Barang Milik Negara; 6) Bendahara; 7) Pengadministrasi Keuangan; 8) Pengelola Gaji; 9) Pengelola Akuntansi; 10) Verifikator Data Laporan Keuangan; 11) Teknisi Sarana dan Prasarana</p> <p>13. Dibawah Kasi Rekayasa dan Produksi</p> <p>1) Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna</p> <p>2) Pengelola Produksi</p> <p>14. Dibawah Kasi Pengembangan dan Layanan Kemasan dan Produk Kulit</p> <p>1) Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna</p> <p>2) Pengelola Produksi</p> <p>15. Dibawah Kasubag Tata Usaha</p> <p>1) Pengadministrasi Persuratan; 2) Pranata Kearsipan; 3) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan; 4) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur; 5) Kustodian Barang Milik Negara; 6) Bendahara; 7) Pengadministrasi Keuangan; 8) Pengelola Gaji; 9) Pengelola Akuntansi; 10) Verifikator Data Laporan Keuangan; 11) Teknisi Sarana dan Prasarana</p> <p>16. Dibawah Kasi Pemberdayaan Kekayaan Intelektual</p> <p>1) Analis Kekayaan Intelektual</p> <p>17. Dibawah Kasi Fasilitas Kekayaan Intelektual</p> <p>1) Analis Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual</p>

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatnya daya saing industri dan perdagangan di tingkat nasional dan global”, antara lain sebagai berikut:

1. Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan pelaku usaha sektor perindustrian dan perdagangan.
Angka kemiskinan di DIY yang masih tinggi, memerlukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Berkembangnya sektor perindustrian dan perdagangan akan berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja, menumbuhkan ekonomi masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.
2. Meningkatkan persaingan usaha sektor perdagangan dalam negeri.
Peningkatan volume produksi daerah lain dan masuknya produk-produk luar negeri ke pasar domestik akibat perdagangan bebas meningkatkan persaingan di pasar dalam negeri. Oleh karenanya peningkatan daya saing pelaku usaha sektor perdagangan perlu ditingkatkan agar dapat memenangkan persaingan.
3. Meningkatkan persaingan usaha sektor perdagangan luar negeri.
Perdagangan bebas membuka peluang bagi semua negara untuk menjual produknya ke negara lain. Hal ini mendorong peningkatan produktivitas negara-negara tersebut. Untuk memenangkan persaingan tersebut daya saing pelaku usaha sektor perdagangan luar negeri DIY harus tinggi.
4. Pengembangan industri kreatif dan kawasan industri di DIY.
Industri kreatif merupakan sektor yang dapat memberikan nilai tambah yang tinggi bagi pelakunya. Tersedianya sumber daya manusia kreatif di DIY merupakan penunjang utama pengembangan sektor ini. Pemusatan industri yang memiliki potensi polusi tinggi di kawasan industri merupakan hal yang harus menjadi perhatian dalam pengembangan industri di DIY.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada						Jenis Kelamin		
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi					Laki	Peremp	
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SMP			SD
1	2	3	4				5	6					7	8	
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1							1

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada							Jenis Kelamin		
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi					Laki	Peremp	
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SMP			SD
1	2	3	4				5	6					7	8	
B.	Jabatan Administrasi														
	1. Administrator	7	7				7	7					3	4	
	2. Pengawas	8		8			8	4	3	1			4	4	
	3. Pelaksana	113		73	39	1	57	5	20	3	26	2	1	34	23
C.	Jabatan Fungsional	27		18	9		24	7	14	3			18	6	
	Jumlah	156					97						59	38	

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Desember 2022

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 37 orang (38,14%), disusul oleh jenjang pendidikan SLTA 26 orang (26,81%), S2 sebanyak 24 orang (24,74%), D3 7 orang (7,22%), SMP 2 orang (2,06%), dan SD 1 orang (1,03%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan; namun untuk jabatan struktural lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Terdapat kekurangan pegawai sebanyak 59 orang, terdiri dari 3 orang jabatan fungsional dan 56 orang pejabat pelaksana. Namun demikian, ketugasan pegawai tersebut dapat diampu oleh tenaga bantu sejumlah 40 orang. Sehingga kekurangan pegawai untuk mendukung kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sebanyak 19 orang. Dari 97 orang pegawai yang ada, terdapat 63 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sebagai pelaksana pemerintahan di bidang industri dan perdagangan.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	Aset Tetap		
1	Tanah	11 unit	20.608.532.000
2	Peralatan dan Mesin	3.392 unit	47.935.224.483
3	Gedung dan Bangunan	26 unit	23.398.788.813
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	15 unit	6.452.968.800
5	Aset Tetap Lainnya	193 unit	98.642.450

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2 unit	119.339.000
	Aset Lainnya		
1	Aset Tidak Berwujud	9 unit	411.793.500
2	Aset Lain-lain	48 unit	1.351.271.711
	Jumlah		100.376.560.271.711

Sumber: Data Neraca Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 31 Desember 2022 (Unaudited)

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2022

Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam melaksanakan tugasannya didukung dengan sarana mobilitas berupa kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 12 (dua belas) unit kendaraan operasional, dan 7 (tujuh) unit kendaraan roda dua. Selain kendaraan bermotor juga didukung oleh sarana berupa perlengkapan dan peralatan kantor. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	307.200.000	247.200.000	(60.000.000)
4 1 02	Retribusi Daerah	257.200.000	222.200.000	(35.000.000)
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	50.000.000	25.000.000	(25.000.000)
	Jumlah Pendapatan	307.200.000	247.200.000	(60.000.000)
5	BELANJA DAERAH			
5 1	BELANJA OPERASI	39.337.169.064	47.878.143.216	8.540.974.152
5 1 01	Belanja Pegawai	17.509.593.172	15.648.658.724	(1.860.934.448)
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.683.815.892	29.890.724.492	10.206.908.600
5 1 05	Belanja Hibah	2.143.760.000	2.338.760.000	195.000.000
5 2	BELANJA MODAL	132.603.000	9.904.707.500	9.772.104.500
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.068.000	8.915.097.000	8.843.029.000
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	249.075.500	249.075.500

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	60.535.000	740.535.000	680.000.000
			Jumlah Belanja	39.469.772.064	57.782.850.716	18.313.078.652
			Total Surplus/(Defisit)	(39.162.572.064)	(57.535.650.716)	(18.253.078.652)
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
			Pembiayaan Neto	0	0	0

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2022

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2022 Pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY semula Rp 307.200.000 dan mengalami perubahan menjadi Rp 247.200.000 atau berkurang Rp 60.000.000. Hal ini dikarenakan terdapat mesin CNC yang merupakan peralatan utama penghasil PAD mengalami kerusakan dan sudah tidak memungkinkan lagi untuk diperbaiki. Untuk tahun 2022 Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY semula Rp 39.469.772.064 dan mengalami perubahan menjadi Rp 57.782.850.716 atau bertambah Rp 18.313.078.652. Hal ini disebabkan terdapat penambahan anggaran untuk penanganan inflasi di periode akhir tahun 2022 yang memerlukan penanganan secara serius. Anggaran ini diantaranya bersumber dari Dana Insentif Daerah. Penambahan anggaran digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan yang diharapkan dapat menurunkan tingkat inflasi di DIY diantaranya penyelenggaraan pasar murah, operasi pasar dan bantuan distribusi barang pokok dan bahan penting.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Kepala Dinas Beserta seluruh jajarannya agar pada tahun anggaran berikutnya mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan lebih optimal lagi dalam upaya peningkatan kinerja pada aspek pencapaian sasaran kinerja organisasi khususnya pada kinerja dari penilaian stakeholder dengan melakukan partisipasi aktif dalam berbagai ajang nasional sehingga dapat memperoleh penghargaan di tingkat nasional untuk meningkatkan nilai kinerja dari penilaian stakeholder	Disperindag DIY telah berupaya secara aktif mengikuti berbagai ajang nasional bahkan internasional sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pada tahun 2022 Disperindag DIY mengikuti berbagai event pameran baik tingkat nasional maupun internasional. Pameran tingkat nasional yang ditujukan untuk meningkatkan pemasaran pelaku usaha sector perindustrian dan perdagangan ini diantaranya adalah Pameran Dekranas, Pameran Jakarta Fair, Seni Kriya, Pameran JIFFINA, Pameran Inacraft, TEI. Sedangkan pameran tingkat internasional yang diikuti adalah Festival Indonesia Frankfurt 2022.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 – 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022.

Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022.

Tahun 2022 ini merupakan tahun terakhir RPJMD 2017-2022. Pada tahun terakhir RPJMD ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah berupaya secara optimal untuk mencapai berbagai target kinerja yang telah ditetapkan.

Perencanaan dan penganggaran di tahun terakhir periode RPJMD 2017-2022 ini difokuskan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19 dan penanganan inflasi yang cukup tinggi di akhir tahun 2022.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY selama lima tahun adalah:

“Meningkatnya daya saing industri dan perdagangan di tingkat nasional dan global”

Adapun sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2022	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY	Rp Juta	7.368	8.123	8.529	8.955	9.403	9.873	9.873
2.	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY	Rp Juta	11.235	12.152	12.638	13.143	13.669	14.216	14.216

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan penggunaan produk lokal, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran baik konvensional maupun online Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kelancaran distribusi, dan stabilisasi harga. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dalam upaya meningkatkan nilai ekspor DIY 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan penggunaan produk lokal, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran Peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor Peningkatan penggunaan produk lokal, pengelolaan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			persaingan usaha serta pengembangan pemasaran
2.	Meningkatnya industri pengolahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan dan penumbuhan IKM melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran produk baik secara konvensional maupun online,, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 2. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kualitas maupun kuantitas serta pengembangan industri yang berwawasan lingkungan (Green Sector) 3. Penguatan dan penumbuhan IKM Industri Kreatif melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran baik secara konvensional maupun online, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk industri kreatif 4. Mengembangkan enterprenurship yang berorientasi pada pengurangan angka kemiskinan 5. Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kreatif khas DIY 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk. 2. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kuantitas maupun kualitas serta pengembangan industri yang berwawasan lingkungan (<i>Green Sector</i>) 3. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk kreatif 4. Penciptaan wira usaha baru melalui pelatihan, diklat, maupun fasilitasi usaha 5. Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kreatif khas DIY

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tahun 2022 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1. Meningkatkan nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	1.1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	28.233.000	46.483.000	18.250.000
	1.1.1. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	28.233.000	46.483.000	18.250.000
	1.1.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	28.233.000	46.483.000	18.250.000
	1.2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	82.487.000	4.650.364.750	4.567.877.750
	1.2.1. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	82.487.000	4.650.364.750	4.567.877.750
	1.2.1.1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	44.557.000	44.557.000	0
	1.2.1.2. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	37.930.000	4.605.807.750	4.567.877.750
	1.3. Program Pengembangan Ekspor	303.580.000	2.666.005.800	2.362.425.800
	1.3.1. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	303.580.000	2.666.005.800	2.362.425.800
	1.3.1.1. Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	172.566.000	2.350.991.800	2.178.425.800
	1.3.1.2. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	131.014.000	315.014.000	184.000.000
1.4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	627.969.000	719.969.000	92.000.000	
1.4.1. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di	320.746.000	412.746.000	92.000.000	

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			
	1.4.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	320.746.000	412.746.000	92.000.000
	1.4.2. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	307.223.000	307.223.000	92.000.000
	1.4.2.1. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	307.223.000	307.223.000	0
	1.5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1.206.656.000	1.606.452.250	399.796.250
	1.5.1. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.206.656.000	1.606.452.250	399.796.250
	1.5.1.1. Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.206.656.000	1.606.452.250	399.796.250
2. Meningkatkan industri pengolahan	2.1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	12.379.600.000	17.067.629.500	4.688.029.500
	2.1.1. Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	12.379.600.000	17.067.629.500	4.688.029.500
	2.1.2. Pengembangan Industri Kreatif	12.379.600.000	17.067.629.500	4.688.029.500
	2.2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	0	218.220.000	218.220.000
	2.2.1. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	0	218.220.000	218.220.000
	2.2.1.1. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	0	218.220.000	218.220.000
	2.3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	4.271.949.600	11.192.297.400	6.920.347.800
	2.3.1. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	4.271.949.600	11.192.297.400	6.920.347.800
	2.3.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	348.851.000	358.851.000	10.000.000

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	2.3.1.2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.138.546.000	4.116.368.800	977.822.800
	2.3.1.3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	784.552.600	6.717.077.600	5.932.525.000
	2.4. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	180.116.750	235.116.750	55.000.000
	2.4.1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	180.116.750	235.116.750	55.000.000
	2.4.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, and IPKI Kewenangan Provinsi	180.116.750	235.116.750	55.000.000
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		19.080.591.350	38.402.538.450	19.321.947.100

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2022

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.389.180.714	19.380.312.266	(1.008.868.548)
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	141.977.000	141.977.000	0
	1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	102.569.000	102.569.000	0
	1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.715.000	11.715.000	0
	1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.693.000	27.693.000	0
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.485.393.172	15.624.458.624	(1.860.934.548)
	2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.402.913.172	15.541.978.624	(1.860.934.548)
	2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70.980.000	70.980.000	0

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000	6.000.000	0
	2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.500.000	5.500.000	0
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.320.000	40.320.000	0
	3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.320.000	40.320.000	0
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	613.050.500	613.050.500	0
	4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.108.000	6.108.000	0
	4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.475.500	52.475.500	0
	4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	67.598.000	67.598.000	0
	4.4. Penyediaan bahan Logistik Kantor	6.303.000	6.303.000	0
	4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	78.879.000	78.879.000	0
	4.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.100.000	17.100.000	0
	4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264.937.000	264.937.000	0
	4.8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	119.650.000	119.650.000	0
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.068.000	606.530.000	534.462.000
	5.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.568.000	282.030.000	213.462.000
	5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000	324.500.000	321.000.000
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.555.241.200	1.645.061.200	89.820.000
	6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	531.982.000	621.802.000	89.820.000

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.023.259.200	1.023.259.200	0
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	481.131.342	708.915.342	227.784.000
	7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.183.000	25.183.000	0
	7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.064.550	244.958.550	(5.106.000)
	7.3. Pemeliharaan Mebel	6.565.000	6.565.000	0
	7.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.890.000	42.890.000	0
	7.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.799.592	282.699.592	182.900.000
	7.6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.629.200	106.619.200	49.990.000
	Total Anggaran Pendukung	20.389.181.214	19.380.312.666	(1.008.868.548)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2022

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.4.1 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY tahun N (atas dasar harga konstan)	Juta Rupiah	9.873.321	Triwulan I	2.468.330
					Triwulan II	4.936.660
					Triwulan III	7.404.991
					Triwulan IV	9.873.321
2.	Meningkatnya industri pengolahan	Nilai industri pengolahan dalam PDRB DIY tahun N (atas dasar harga konstan)	Juta Rupiah	14.215.611	Triwulan I	3.553.903
					Triwulan II	7.107.805
					Triwulan III	10.661.708
					Triwulan IV	14.215.611

Keterangan **Tambahan:**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan (APBD)	Rp28.233.000
		Program Pengembangan Ekspor (APBD)	Rp303.580.000
2.	Program Perlindungan dan Pengamanan Konsumen	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (APBD)	Rp82.487.000
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (APBD)	Rp627.969.000
3.	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (APBD)	Rp1.206.656.000
4.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp20.389.180.714
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan		

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
	Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		
7.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (APBD)	Rp4.271.949.600
8.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		
9.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	Program Pengendalian Izin Usaha Industri (APBD)	Rp180.116.750
	Jumlah Anggaran		Rp27.090.172.064

2. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan:

- a. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Sub Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif Rp 16.398.598.000.
- b. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Rp 200.000.000.

3. Mengelola anggaran dekonsentrasi:

- a. Program Perdagangan Luar Negeri Kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah Subkegiatan Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah Rp 191.586.000.
- b. Program Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri Subkegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp 151.197.000.
- c. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka Subkegiatan Fasilitas dan Pembinaan Industri Rp 983.680.000.

- d. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka Subkegiatan Pelatihan Bidang Industri Rp 112.320.000.
- e. Program Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah Subkegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah Rp 626.218.000.

Pada tahun 2022, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Reviu dilakukan karena adanya perubahan anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II.4.2 Perjanjian Kinerja Reviu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY tahun N (atas dasar harga konstan)	Juta Rupiah	9.873.321	Triwulan I	2.468.330
					Triwulan II	4.936.660
					Triwulan III	7.404.991
					Triwulan IV	9.873.321
2.	Meningkatnya industri pengolahan	Nilai industri pengolahan dalam PDRB DIY tahun N (atas dasar harga konstan)	Juta Rupiah	14.215.611	Triwulan I	3.553.903
					Triwulan II	7.107.805
					Triwulan III	10.661.708
					Triwulan IV	14.215.611

Keterangan **Tambahan**:

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran bertambah 99,43%.
2. Mengelola Dana Keistimewaan:
 - a. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Budaya Sub Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif Rp 17.067.629.500.
 - b. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Kasultanan dan Kadipaten

Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Rp 218.220.000.

3. Mengelola anggaran dekonsentrasi:
 - a. Program Perdagangan Luar Negeri Kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah Subkegiatan Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah Rp 191.586.000.
 - b. Program Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri Subkegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp 151.197.000.
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka Subkegiatan Fasilitas dan Pembinaan Industri Rp 983.680.000.
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka Subkegiatan Pelatihan Bidang Industri Rp 112.320.000.
Program Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah Subkegiatan Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah Rp 626.218.000.
4. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga.

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprovo.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

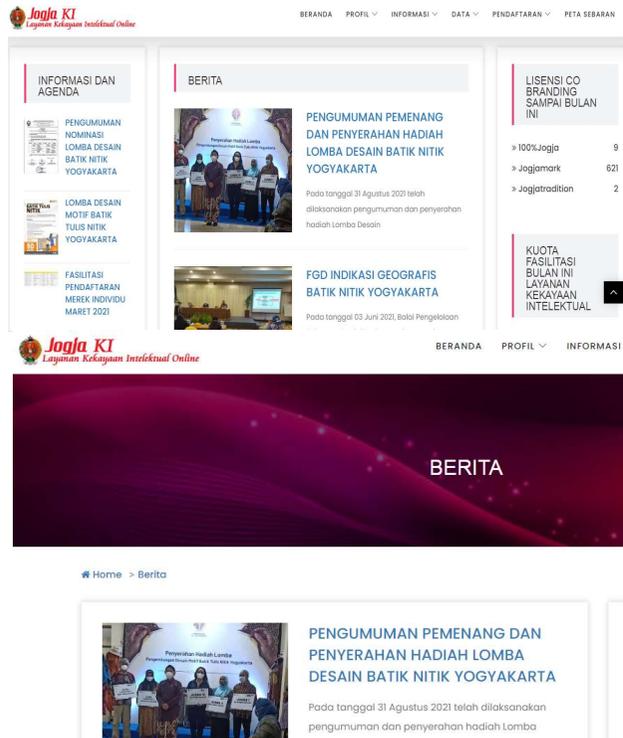
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



Sumber: <http://sungguh.jogjaprovo.go.id/>

2. Layanan Konsultasi dan Pendaftaran Fasilitasi HKI secara online. Layanan ini menggunakan aplikasi JogjaKI. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengakses informasi dan fasilitasi HKI secara online.

Gambar II.2. Aplikasi JogjaKI



Sumber: <https://disperindag.jogjaprov.go.id/haki/>

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2022
2. Realisasi Anggaran
3. Inovasi
4. Lintas Sektor

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2022. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2021	TAHUN 2022			KRITERIA / KODE	TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	<u>Indikator:</u> Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY <u>Meta Indikator:</u> Nilai sektor perdagangan dalam	Juta Rupiah	7.36 7.62 4	8.379.070	9.873.321	8.856.677	89,70	Tinggi	9.873.321

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2021	TAHUN 2022				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PDRB DIY tahun n (Atas dasar harga konstan)								
2	Meningkatnya industri pengolahan	<u>Indikator:</u> Nilai industri pengolahan dalam PDRB DIY <u>Meta Indikator:</u> Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY tahun n (Atas dasar harga konstan)	Juta Rupiah	11.234.803,5	12.670.357	14.215.611	13.392.567	94,21	Sangat Baik	14.215.611

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1: Meningkatkan nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri

Kinerja sasaran meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri diukur dengan indikator nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY	Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY tahun n (Atas dasar harga konstan)

Kinerja sasaran meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY	Rp 8.379.070 Juta	Rp 9.873.321 Juta	Rp 8.856.677 Juta	89,70% [(8.856.677/ 9.873.321) x 100%]	Rp 9.873.321 Juta	89,70%

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri adalah sebagai berikut:

- Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY mencapai Rp 8.856.677 Juta, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 89,70% (tidak terlampaui)
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp 8.379.070, terdapat peningkatan sebesar Rp 477.607 Juta
- Capaian target indikator pada tahun 2022 mencerminkan capaian Tahun akhir Perencanaan periode 2017-2022

Faktor Pendukung keberhasilan

- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah diperlonggar sehingga aktivitas perekonomian sudah mulai membaik
- Meningkatnya aktivitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) yang berdampak terhadap tumbuhnya IKM pangan
- Aktivitas industri mulai pulih yang berdampak pada aktivitas perdagangan
- Peningkatan harga komoditi dunia sehingga mendorong peningkatan ekspor DIY
- Peningkatan aktivitas perdagangan luar negeri ditandai dengan meningkatnya nilai ekspor.
- Paket kebijakan pemerintah terkait deregulasi dan debirokratisasi, kebijakan Kemudahan Inpor Tujuan Ekspor (KITE), serta kebijakan terkait pusat logistic turut mendorong peningkatan ekspor DIY.

- g. Peningkatan pendapatan perkapita, peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, serta adanya kebijakan lokal untuk penciptaan pasar di daerah mendorong peningkatan aktivitas perdagangan dalam negeri.
- h. Maraknya bisnis online, tersedianya sarana perdagangan online, tumbuhnya bisnis logistik dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan memicu peningkatan kinerja sektor industri.
- i. Tersedianya pelaku usaha sector industry dan perdagangan yang ulet, kreatif, dan inovatif.

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Adanya pandemi yang belum 100% pulih menyebabkan daya beli negara tujuan ekspor belum pulih.
- b. Perdagangan bebas memperluas peluang ekspor produk DIY, namun belum diimbangi dengan tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana pendukung ekspor yang memadai. Selain itu, Eropa dan Amerika yang merupakan negara tujuan ekspor utama DIY tengah mengalami resesi sehingga berdampak pada terkendalanya ekspor DIY ke negara-negara tersebut.
- c. Peningkatan barang beredar yang merupakan dampak perdagangan bebas dan berkembangnya perdagangan online belum diimbangi dengan pemenuhan standarisasi produk secara optimal. Selain itu, kesadaran pelaku perdagangan tentang tertib niaga dan kesadaran konsumen mengenai hak-haknya masih kurang.
- d. Tingkat inflasi barang pokok penting yang cukup tinggi di akhir tahun 2022

3.1.2. Sasaran meningkatnya industri pengolahan

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya industri pengolahan diukur dengan indikator nilai industri pengolahan dalam PDRB DIY. Indikator nilai industri pengolahan dalam PDRB DIY diperoleh dari data nilai sektor industri dalam PDRB DIY tahun 2022 atas dasar harga konstan yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya industri pengolahan	Nilai industri pengolahan dalam PDRB DIY	Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY tahun n (Atas dasar harga konstan)

Kinerja sasaran meningkatnya industri pengolahan diukur dengan indikator nilai industri pengolahan dalam PDRB DIY (Juta Rupiah) pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.6 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai sektor perindustrian dalam PDRB DIY tahun N (Atas dasar harga konstan)	Rp 12.670.357 Juta	Rp 14.215.611 Juta	Rp 13.392.567 Juta	94,21% [[13.392.567/ 14.215.611] x 100%]	Rp 14.215.611 Juta	94,21%

Analisis Ketercapaian Sasaran 2: Meningkatnya industri pengolahan

- Nilai sektor perindustrian dalam PDRB DIY mencapai Rp 13.392.567 Juta, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 94,21% (tidak terlampaui).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp 12.670.357 Juta, terdapat peningkatan sebesar Rp 722.210 Juta.
- Capaian target indikator pada tahun 2022 mencerminkan capaian Tahun akhir Perencanaan periode 2017-2022.

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah diperlonggar sehingga aktivitas perekonomian sudah mulai membaik.
- b. Meningkatnya aktivitas MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) yang berdampak terhadap tumbuhnya IKM pangan.
- c. Maraknya bisnis online, tersedianya sarana perdagangan online, tumbuhnya bisnis logistik dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan memicu peningkatan kinerja sektor industri.
- d. Pelaksanaan program penumbuhan dan pengembangan IKM baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat dan stakeholder lainnya memicu peningkatan kinerja sektor industri.
- e. Tersedianya pelaku usaha sector industry dan perdagangan yang ulet, kreatif, dan inovatif.

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Bahan baku industri tertentu masih tergantung pasokan dari negara lain sehingga peningkatan harga bahan baku akibat peningkatan biaya logistik, peningkatan harga komoditas dunia, terganggunya pasokan gandum akibat perang Ukraina-Rusia mengakibatkan terganggunya produktivitas sector industri pengolahan. Selain itu, sektor industri kecil Menengah masih terkendala Kapasitas SDM, teknologi, standarisasi, inovasi produk dan kemampuan akses pasar yang masih harus ditingkatkan.
- b. Kurangnya permintaan produk industri DIY dari pasar domestik maupun global juga berdampak pada produktivitas pelaku usaha sector ini. Hal ini dikarenakan daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih pasca pandemic, selain itu resesi di negara tujuan ekspor utama DIY menyebabkan berkurangnya order dari negara-negara tersebut.

3.2 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. Pemanfaatan media sosial dan google (misalnya layanan unduhan via google drive) untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.
- b. Pemanfaatan aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY misalnya aplikasi:
 - 1. layanan Konsultasi Bisnis melalui aplikasi *Jogja Business Service Centre* (JBSC);
 - 2. layanan konsultasi, pendampingan, serta pendaftaran fasilitasi Kekayaan Intelektual secara online melalui aplikasi JogjaKI;
 - 3. layanan pengaduan konsumen secara online melalui Aplikasi Sistem Informasi Konsumen Cerdas (SIKONCER);
 - 4. pemanfaatan aplikasi E-Arsip dalam pengelolaan arsip dinas dalam rangka mendukung layanan public;
 - 5. layanan pemasaran online melalui aplikasi Jogjaplaza;
 - 6. pengembangan aplikasi olah data SILDASI (Sistem Informasi Layanan Data Sektor Industri dan Perdagangan);
 - 7. pengembangan Aplikasi Monev untuk mempermudah penyusunan laporan monitoring lapangan.
- c. Pembentukan Klinik Permasalahan Hukum dimana ASN mendapat bantuan saat menghadapi permasalahan hukum (regulasi) yang ditemui dalam pelaksanaan tugasnya.
- d. Layanan edukasi bagi pelaku usaha sektor industri dan perdagangan secara hybride.
- e. Penyediaan oksigen medis gratis melalui penyelenggaraan Omah Oksigen Jogja.
- f. Layanan produksi gamelan menggunakan teknologi moulding.

3.3 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang

Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimwa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY adalah sebagai berikut:

Tabel III.7.

Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

NO	KEGIATAN LINTAS SEKTOR	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
1.	Peningkatan Ekspor Impor DIY melalui Kolaborasi Lintas Sektor	Disperindag DIY	Melakukan pembinaan IKM Ekspor Impor DIY dari sisi peningkatan kualitas dan kuantitas produk, sertifikasi, fasilitasi promosi, penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan peningkatan kapasitas pelaku ekspor	Pembinaan ekspor secara terintegrasi	Pelaku Usaha Ekspor Impor	<p>Bagi OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Nilai Perdagangan Mendukung pencapaian kinerja Program Pengembangan Ekspor <p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendapatkan pembinaan yang terintegrasi yang berdampak pada peningkatan usaha ekspor impornya
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Melakukan pembinaan pelaku usaha pertanian dalam menyediakan bahan baku produksi produk ekspor. Pembinaan dalam penyediaan produk pertanian kualitas ekspor			
		DPPM	Pembinaan berkaitan dengan perijinan bagi pelaku usaha ekspor impor			
		Balai Karantina	Pembinaan berkaitan ekspor impor produk tanaman dan hewan			

NO	KEGIATAN LINTAS SEKTOR	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		OPD Lainnya	Melakukan pembinaan terkait ekspor impor sesuai dengan kewenangannya			
		Pelaku Ekspor Impor	Memberikan masukan berupa permasalahan dan berbagai kendala dalam menjalankan usaha ekspor impor sebagai bahan pembinaan			
2.	Optimalisasi Layanan Konsultasi Bisnis melalui Aplikasi <i>Jogja Business Service Centre</i> (JBSC)	Disperindag DIY	Admin dan konsultan permasalahan bisnis di bidang pemasaran, produksi, perlindungan Kekayaan Intelektual, pemanfaatan Alat Teknologi Tepat Guna dan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	Layanan Konsultasi Bisnis secara Online	Pelaku Usaha di DIY	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Nilai Perdagangan 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengembangan Ekspor, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri serta Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Bank Indonesia	Penyediaan Sarana dan prasarana			
		DPPM	Konsultan terkait perijinan			
		Bea Cukai	Konsultan terkait dengan kepabeanan			

NO	KEGIATAN LINTAS SEKTOR	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
		Balai Karantina	Konsultan terkait kekarantinaan produk ekspor impor berupa hewan dan tumbuhan			Bagi Kelompok Sasaran: Peningkatan pengetahuan manajemen usaha
		Perbankan	Konsultasi bisnis terkait dengan transaksi keuangan			
		OPD Lainnya	Konsultan sesuai dengan kewenangannya			
		Pelaku Usaha DIY	Memberikan masukan berupa permasalahan dan berbagai kendala dalam menjalankan usaha bisnis sebagai bahan pembinaan			
3.	Pemantauan Harga dan Pengawasan Stok Bahan Pokok dan Barang Penting dalam Mendukung <i>Early Warning System</i> Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting	Disperindag DIY	Koordinator, pengelola data, pemantau di 3 (tiga) pasar percontohan Kota Yogyakarta	Informasi Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting sebagai pendukung <i>Early Warning System</i> dan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan stabilisasi harga	Masyarakat	Bagi OPD: <ol style="list-style-type: none"> Mendukung pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Perdagangan Mendukung pencapaian program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Bagi Kelompok Sasaran: <ol style="list-style-type: none"> Stabilnya harga barang kebutuhan pokok dan
		Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota	Memantau stok dan harga di pasar Kabupaten/Kota dan menyampaikan data hasil pantauan untuk diolah			

NO	KEGIATAN LINTAS SEKTOR	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN barang penting bagi masyarakat
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
4.	Peningkatan Usaha Sektor Industri dan Perdagangan melalui Penguatan Perijinan	Disperindag DIY	Melakukan verifikasi teknis untuk mendukung pemenuhan komitmen yang menjadi syarat penerbitan ijin usaha	Terbitnya perijinan usaha sektor industri dan perdagangan	Pelaku Usaha di DIY	<p>Bagi OPD: Mendukung pencapaian target kinerja program pengendalian izin usaha industri</p> <p>Bagi Kelompok sasaran: Terlayannya penerbitan surat ijin usaha dan layanan verifikasi teknis pemenuhan komitmen</p>
		DPPM	Menerbitkan perijinan			
		Pelaku Usaha di DIY	Memberikan umpan balik untuk perbaikan aplikasi OSS dan layanan penerbitan perijinan			

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencapaian target kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tahun 2022 dihadapkan pada hambatan dan permasalahan sebagai berikut ini.
 - a. Bahan baku industri tertentu masih tergantung pasokan dari negara lain sehingga peningkatan harga bahan baku akibat peningkatan biaya logistik, peningkatan harga komoditas dunia, terganggunya pasokan gandum akibat perang Ukraina-Rusia mengakibatkan terganggunya produktivitas sector industri pengolahan. Selain itu, sektor industri kecil Menengah masih terkendala Kapasitas SDM, teknologi, standarisasi, inovasi produk dan kemampuan akses pasar yang masih harus ditingkatkan.
 - b. Kurangnya permintaan produk industri DIY dari pasar domestik maupun global juga berdampak pada produktivitas pelaku usaha sector ini. Hal ini dikarenakan daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih pasca pandemic, selain itu resesi di negara tujuan ekspor utama DIY menyebabkan berkurangnya order dari negara-negara tersebut.
 - c. Perdagangan bebas memperluas peluang ekspor produk DIY, namun belum diimbangi dengan tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana pendukung ekspor yang memadai. Selain itu, Eropa dan Amerika yang merupakan negara tujuan ekspor utama DIY tengah mengalami resesi sehingga berdampak pada terkendalanya ekspor DIY ke negara-negara tersebut.
 - d. Peningkatan barang beredar yang merupakan dampak perdagangan bebas dan berkembangnya perdagangan online belum diimbangi dengan pemenuhan standarisasi produk secara optimal. Selain itu, kesadaran pelaku perdagangan tentang tertib niaga dan kesadaran konsumen mengenai hak-haknya masih kurang.
 - e. Tingkat inflasi barang pokok penting yang cukup tinggi di akhir tahun 2022

2. Pencapaian target kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY tahun 2022 didukung faktor-faktor sebagai berikut ini.
 - a. Peningkatan aktivitas perdagangan luar negeri ditandai dengan meningkatnya nilai ekspor.
 - b. Paket kebijakan pemerintah terkait deregulasi dan debirokratisasi, kebijakan *Kemudahan Inpor Tujuan Ekspor* (KITE), serta kebijakan terkait pusat logistic turut mendorong peningkatan ekspor DIY.
 - c. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah diperlonggar sehingga aktivitas perekonomian sudah mulai membaik.
 - d. Meningkatnya aktivitas MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) yang berdampak terhadap tumbuhnya IKM pangan.
 - e. Peningkatan pendapatan perkapita, peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, serta adanya kebijakan lokal untuk penciptaan pasar di daerah mendorong peningkatan aktivitas perdagangan dalam negeri.
 - f. Maraknya bisnis online, tersedianya sarana perdagangan online, tumbuhnya bisnis logistik dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan memicu peningkatan kinerja sektor industri.
 - g. Pelaksanaan program penumbuhan dan pengembangan IKM baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat dan stakeholder lainnya memicu peningkatan kinerja sektor industri.
 - h. Tersedianya pelaku usaha sector industry dan perdagangan yang ulet, kreatif, dan inovatif.

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut.

- a. Pemenuhan bahan baku industri dilakukan dengan mendorong penyediaan dan penggunaan bahan baku local serta peningkatan kemitraan dengan penyedia bahan di luar DIY, seperti Jawa Timur, Kalimantan, dan daerah lainnya. Selain itu, dilakukan peningkatan pembinaan IKM baik terkait dengan peningkatan kapasitas, pemanfaatan teknologi, inovasi produk, strategi pemasaran, serta standarisasi dan sertifikasi untuk meningkatkan daya saing;
- b. Mendorong ekspor ke negara tujuan ekspor baru dan peningkatan pemasaran domestic

- c. Mendorong penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung ekspor yang memadai melalui sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta mendorong penciptaan pasar ekspor baru;
- d. Peningkatan pemantauan dan pengawasan barang beredar melalui sinergitas lintas sektor, serta peningkatan kesadaran produsen, konsumen dan masyarakat umum tentang pentingnya tertib niaga dan perlindungan konsumen serta optimalisasi peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- e. Penyediaan data harga dan stock barang pokok penting sebagai pendukung *early warning system* serta penyelenggaraan Operasi Pasar dan Pasar Murah.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2021)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2026)
						Tahun ke-1 (2022)	Tahun ke-2 (2023)	Tahun ke-3 (2024)	Tahun ke-4 (2025)	Tahun ke-5 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya daya saing Industri dan Perdagangan di tingkat nasional dan Global	Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY			Rp 8.379.070 juta	Rp. 9.965.527 Juta	Rp. 10.497.686 Juta	Rp. 11.078.208 Juta	Rp. 11.709.666 Juta	Rp. 12.392.340 Juta	Rp. 12.392.340 Juta
		Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY			Rp 12.670.357Juta	Rp. 13.583.796 Juta	Rp. 13.649.081 Juta	Rp. 13.717.012 Juta	Rp. 13.787.380 Juta	Rp. 13.859.723 Juta	Rp. 13.859.723 Juta
			Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Nilai Ekspor Tahun n	US\$ 521 Juta	US\$ 573 Juta	US\$ 630 Juta	US\$ 694 Juta	US\$ 763 Juta	US\$ 839 Juta	US\$ 839 Juta
			Meningkatnya industri pengolahan	Produktivitas tenaga kerja industri	Rp 32 Juta/orang	Rp. 33 Juta/Ora ng	Rp. 34 Juta/Or ang	Rp. 35 Juta/Or ang	Rp. 36 Juta/Or ang	Rp. 37 Juta/Or ang	Rp. 37 Juta/Or ang
			Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A	A

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY
 Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY tahun N (atas dasar harga konstan)	Juta Rupiah	9.873.321	Triwulan I	2.468.330
					Triwulan II	4.936.660
					Triwulan III	7.404.991
					Triwulan IV	9.873.32180
2.	Meningkatnya industri pengolahan	Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY tahun N (atas dasar harga konstan)	Juta Rupiah	14.215.611	Triwulan I	3.553.903
					Triwulan II	7.107.805
					Triwulan III	10.661.708
					Triwulan IV	14.215.611

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan (APBD)	Rp46.483.000
		Program Pengembangan Ekspor (APBD)	Rp1.891.005.800

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
2.	Program Perlindungan dan Pengamanan Konsumen	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (APBD)	Rp2.250.364.750
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (APBD)	Rp719.969.000
3.	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (APBD)	Rp1.606.452.250
4.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp18.798.312.266
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		
7.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (APBD)	Rp11.192.297.400
8.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri (APBD)	Rp235.116.750
9.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		
Jumlah Anggaran			Rp54.025.850.716

2. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan :
 a. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Sub kegiatan Pengembangan Industri Kreatif Rp17.067.629.500

- b. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Rp218.220.000

3. Mengelola anggaran dekonsentrasi :

- a. Program Perdagangan Luar Negeri Kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah Subkegiatan Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah Rp191.586.000
- b. Program Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri Subkegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp151.197.000
- c. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka subkegiatan Fasilitas dan Pembinaan Industri Rp983.680.000
- d. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka subkegiatan Pelatihan Bidang Industri Rp112.320.000
- e. Program Perdagangan Dalam Negeri kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah subkegiatan Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah Rp626.218.000

Yogyakarta, 31 Oktober 2022



Lampiran 3. Evaluasi LKj IP Tahun 2021

R



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogoadi, Mlati, Sleman
Telepon (0274) 562009 Faksimile (0274) 512567

Website: <http://inspektorat.jogjaprovo.go.id> Email : inspektorat@jogjaprovo.go.id

Yogyakarta, 18 - 03 - 2022

Nomor : 700/01181
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem
AKIP Tahun 2021 pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
DIY

Kepada
Yth. Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor 055/II/INSP/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Sehubungan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian DIY. dengan tujuan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD.
2. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Tim Evaluasi (Evaluator) Inspektorat DIY melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi:
 - 1) Perencanaan Strategis, meliputi Sub Komponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;
 - 2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi Sub Komponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, serta Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan.

b) Aspek...

✓

- b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pengukuran;
 - 2) Kualitas Pengukuran;
 - 3) Implementasi Pengukuran.
 - c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pelaporan;
 - 2) Penyajian Informasi Kinerja;
 - 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
 - d. Evaluasi Internal meliputi:
 - 1) Pemenuhan Evaluasi;
 - 2) Kualitas Evaluasi;
 - 3) Pemanfaatan Evaluasi.
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
 - 1) Kinerja yang Dilaporkan (*Output*);
 - 2) Kinerja yang Dilaporkan (*Outcome*);
 - 3) Kinerja yang Dilaporkan (IKU);
 - 4) Kinerja dari Penilaian Stakeholder.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memperoleh nilai sebesar **86,58** kategori A dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel;
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dengan rincian sebagai berikut:
- a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 28,89 atau 96,32% dari bobot sebesar 30%;
 - b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 22,12 atau 88,47% dari bobot sebesar 25%;
 - c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,98 atau 86,56% dari bobot sebesar 15%;
 - d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 8,00 atau 80,00% dari bobot sebesar 10%;
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 14,58 atau 72,92% dari bobot sebesar 20%.
5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat DIY pada Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2020, sudah dilakukan perbaikan kinerja pada Aspek Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

6) Sehubungan...

✕

6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2021 seperti tersebut pada angka 4 di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY beserta seluruh jajarannya agar pada tahun anggaran berikutnya mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan lebih optimal lagi dalam upaya peningkatan kinerja pada Aspek Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi khususnya pada Kinerja Dari Penilaian Stakeholder dengan melakukan partisipasi aktif dalam berbagai ajang nasional sehingga dapat memperoleh Penghargaan di Tingkat Nasional untuk meningkatkan nilai Kinerja dari Penilaian Stakeholder

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2021 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 - 3 - 2022



Tembusan:
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

4

Perjanjian Kinerja, serta Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan;

- b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pengukuran;
 - 2) Kualitas Pengukuran;
 - 3) Implementasi Pengukuran.
 - c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pelaporan;
 - 2) Penyajian Informasi Kinerja;
 - 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
 - d. Evaluasi Internal meliputi:
 - 1) Pemenuhan Evaluasi;
 - 2) Kualitas Evaluasi;
 - 3) Pemanfaatan Evaluasi.
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
 - 1) Kinerja Yang di Laporkan (*Output*);
 - 2) Kinerja Yang di Laporkan (*Outcome*);
 - 3) Kinerja Yang di Laporkan (IKU);
 - 4) Kinerja dari Penilaian Stakeholder.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY memperoleh nilai sebesar 80,96 dengan predikat A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel)
 4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,06 atau 86,87% dari bobot sebesar 30%;
 - b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 21,98 atau 87,92% dari bobot sebesar 25%;
 - c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,00 atau 80,00% dari bobot sebesar 15%;
 - d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 8,42 atau 84,17% dari bobot sebesar 10%;
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 12,50 atau 62,50% dari bobot sebesar 20%.
 5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta pada Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2015 yang lalu, telah dilakukan tindak lanjut yaitu melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan rutin baik mingguan, bulanan dan triwulanan.
 6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun

Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY beserta seluruh jajarannya agar melakukan upaya untuk mempertahankan kinerja yang telah baik dan terus meningkatkan kinerja sehingga seluruh target baik *output* maupun *outcome* yang ditetapkan dapat tercapai.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY Tahun 2016, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


DRA KRISTIANA SWASTI, M.Si.
NIP. 19581126 198402 2 003

Tembusan :

Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**